**“PENYINTESISAN ”**

**Penulis :**

**Nama : Rachma Lisa Agustiana**

**NPM : 2052011016**

**P.S : Ilmu Hukum**

**Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia**

**Dosen : Atik Kartika, S.Pd., M,Pd.**

****

**Jurusan Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Bandar Lampung**

**28 Desember 2020**

**“Berikan tiga contoh penyintesisan dalam KTI pada skripsi atau tesis yang anda ketahui”.**

1.Anak-anak memperoleh komponen-komponen utama bahasa ibu mereka dalam waktu yang relatif singkat. Ketika mereka mulai bersekolah dan mempelajari bahasa secara formal, mereka sudah mengetahui cara berbicara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka sudah mengetahui dan mengucapkan sejumlah besar kata. Namun, perkembangan bahasa tidak berhenti ketika seorang anak sudah mulai bersekolah atau ketika dia sudah dewasa. Proses perkembangan terus berlangsung sepanjang hayat. Bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari satu tahun, sebelum dapat mengucapkan suatu kata. Mereka memperhatikan muka orang dewasa dan menanggapi orang dewasa, meskipun tentu saja belum menggunakan bahasa dalam arti yang sebenarnya. Mereka juga dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa.

Selanjutnya ketika berumur satu tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti halnya bermain dengan jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Seperti halnya kemampuan berjalan, kemampuan berbicara anak-anak seluruh dunia mulai pada umur yang hampir sama dan dengan cara yang hampir sama pula.

2. Pemerkosaan (rape) berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi (Haryanto, 1997). Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum (Wignjosoebroto dalam Prasetyo, 1997). Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pada pasal ini pemerkosaan didefinisikan bila dilakukan di luar perkawinan. Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum pemerkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan pemerkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.”

Dalam menyusun paragraf di atas tampak bahwa penulis hanya hanya menggabungkan beberapa pernyataan yang berasal dari sumber tertentu. Walaupun ketiga kalimat di atas saling bertemali, penulis belum melakukan penyintesisan dengan baik. Kalimat-kalimat tersebut belum dipadukan secara cermat sehingga topik yang disampaikannya pun masih tampak belum jelas. Begitu pula, ketiga kalimat terakhir sebenarnya hanya memperjelas defenisi pemerkosaan yang terdapat pada kalimat dua dan tiga. Pernyataan di atas akan lebih tepat jika disentesiskan sebagai berikut.

“Pemerkosaan berasal dari bahasa Latin rapere yang berarti tindakan ’mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi’ (Haryanto, 1997). Tindakan ini berupa pelampiasan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinilai melanggar moral dan hukum (Wignjosoebroto dalam Prasetyo, 1997). Pelakunya bisa diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun ( Pasal 285 KUHP).

3. Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyintesisan :

Seluruh perangkat desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Kinerja aparatur pemerintah desa merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah ditentukan terlebih dahulu telah dicapai. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.